

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diopnegoro, Semarang.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadisoepipto, Hartono, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hroub, Khalid, 2010, “*Palestinian Islamism: Conflating National Liberation and Socio-Political Change, dalam Islamists Mass Movements, Internal Actors and Political Change In The Arab World. International Institute For Democracy and Electoral Assistance*, Sweden.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persda, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Najih, Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke 8, Bandung.

Wahid, Abdul dan Sunardi 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.

Wright, Lawrence 2006, *Sejarah Teror: Jalan Panjang Menuju 11/9*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 2002, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

PERPPU No. 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106)

PERPPU No 2/2002 tentang pemberlakuan Perppu No 1/2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285)

Undang_Undang Nomor 5 tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616)

Undang_Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999

(Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5406)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 perubahan tentang UU No 15/ 2003
tentang Penetapan PERPPU No. 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6216)

C. Jurnal

Chemerinsky, Erwin, "Substantive Due Process", *Touro Law Review*, Vol. 15,
hlm. 1501, 1999

Comras, Victor D., "UN Terrorist Designation System Needs Reform".
Perspectives On Terrorism, Vol II, Issue 10, 2008

Conkle, Daniel O., "Three Theories of Substantive Due Process", *North Carolina
Law Review*, Vol. 85, 2006

Danendra, Ida Bagus, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur
Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4,
Oktober-Desember 2012

Feinäugle, Clemens A., "The UN Security Council Al-Qaida and Taliban
Sanctions Committee: Emerging Principles of International Institutional
Law for the Protection of Individuals?", *German Law Journal*, Vol. 9, No.
11, 2008

Hudson, Rex A., "The Sociology and Psychology of Terrorism: Who become a
Terrorist and Why?", *Library of Congress*, Washington D.C., 1999.

Latifah, Marfuatul, "Pelindungan Ham Dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris Di Indonesia" *Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 9, No. 1, Juni 2018*

Packer, Herbert, "Two Models of The Criminal Process", *University of Pennsylvania Law review, Vol.113, No.1. November 1964*

Report of the Task Force on Disorders and Terrorism, National advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals, Washington D.C., 1976

Sandefeur, Timothy, "In Defense Of Substantive Due Process, Or The Promise Of Lawful Rule", *Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol. 35, No. 1, hlm. 285, 2012*

Siregar, Rahmat Efendy Al Amin, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM", *Jurnal Ilmiah FITRAH, Volume I, 2015*

Yerkes, Martha. "The limits of the criminal sanction, by Herbert L. Packer (1968)". *Loyola of Los Angeles Law Review, April 1969*

D. Skripsi dan Tesis

Abdie, Yosie, 2014, Prinsip Non-Interference ASEAN dalam Penanganan Isu Terorisme di Kawasan Asia Tenggara, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Christian, Laksono Daniel, 2015, Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Terorisme Setelah Berlakunya UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hartati, 2008, Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Megawati dalam Isu Terorisme, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumarno, 2014, Relevansi Konsep Pendekatan Human Security Mahbub Ul Haq Dalam Pencegahan Perkembangan Terorisme Internasional, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. Internet

CNN Editorial Research, "September 11 Terror Attacks Fast Facts", diakses dari <https://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-fast-facts/index.html> pada tanggal 5 Juli 2020

Institute for Economics & Peace, “*Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism*”, diakses dari <http://visionofhumanity.org/reports> pada 10 Juni 2020

Noah Birkhäuser, “Sanctions of the Security Council Against Individuals – Some Human Rights Problems”, <http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/Birkhauser.PDF>. diakses pada 5 November 2020

Rina Chadijah, 2018, “Aksi Teror dan Jumlah Terduga Teroris yang Ditangkap Meningkat”, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/terorisme-2018-12272018142403.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020

Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Human Rights”, <https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/> diakses pada 21 November 2020

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “What Are Human Rights?”, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatAreHumanRights.aspx> diakses pada 21 November 2020